

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

DAERAH

ACCRUAL ACCOUNTING



TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Manado, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**


EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19720803 199803 100S

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kami, sehingga Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara bisa disusun. Tahun Anggaran 2021 Berbasis Akrual sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan keuangan daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021, pada akhirnya dapat tersusun sesuai dengan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual ini menyajikan informasi tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan kebijakan, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah pada tahun 2021.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 Berbasis Akrual ini kami susun sebagai wujud akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Manado, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA


EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19720803 199803 1005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

KODE AKUN.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN - LRA	89.100.000,00	89.100.000,00	100	750.000,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH- LRA	89.100.000,00	89.100.000,00	100	750.000,00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah -L RA	0 ,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	89.100.000,00	89.100.000,00	100,00	750.000,00
5	BELANJA	24.900.242.774,00	24.241.621.039,00	97,35	17.385.531.863,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	24.192.911.156,00	23.568.936.561,00	97,42	16.262.594.464,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.170.278.132,00	5.687.741.269,00	92,18	5.550.164.904,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.762.514.612,00	15.621.076.880,00	99,10	10.712.429.560,00
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	2.260.118.412,00	2.260.118.412,00	100,00	0,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	707.331.618,00	672.684.478,00	95,10	1.122.937.399,00
5 . 2 . 1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	707.331.618,00	672.684.478,00	95,10	1.122.937.399,00
5 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	0 ,00	0 ,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2 . 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.811.142.774,00)	(24.152.521.039,00)	97,35	(17.384.781.863,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(24.811.142.774,00)	(24.152.521.039,00)	97,35	(17.384.781.863,00)

Manado, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**



EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19710803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

NO. REKENING	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN - LO	89.100.000,00	750.000,00	88.350.000,00	11,78
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	89.100.000,00	750.000,00	88.350.000,00	11,78
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	89.100.000,00	750.000,00	88.350.000,00	11,78
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	26.542.104.794,00	20.082.980.996,00	3.641.874.536,00	18,13
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	5.700.900.811,00	5.562.972.045,00	137.928.766,00	2,48
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	15.763.836.309,00	10.709.425.319,00	5.054.410.990,00	47,20
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	2.260.118.412,00	0,00	2.260.118.412,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.817.249.262,00	3.810.563.632,00	-993.314.370,00	-35,26
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00

NO. REKENING	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(26.453.004,794,00)	(20.082.230.996,00)	(6.370.773.798,00)	24,08
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(26.453.004,794,00)	(20.082.230.996,00)	(6.370.773.798,00)	24,08
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(26.453.004,794,00)	(20.082.230.996,00)	(6.370.773.798,00)	24,08

Manado, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA



EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19710803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	9.033.196.325,00	12.063.267.798,00
SURPLUS/DEFISIT -LO	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KE SALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	
Koreksi ekuitas lainnya	(2.250.000)	(332.622.340,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	24.152.521.039,00	17.384.781.863,00
EKUITAS AKHIR	6.730.462.570,00	9.033.196.325,00

Manado, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19710803 199803 1 005



LAPORAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH
NERACA
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		0 , 0 0	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0 , 0 0
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		7.828.933,00	30.889.741,00
JUMLAH ASET LANCAR		7.828.933,00	30.889.741,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam proyek Pembangunan		0 , 0 0	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		0,00	0,00
ASSET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		18 .128.18 2.295,00	17.568.281.207,00
Gedung dan Bangunan		352.68.2.106,00	352.682.106,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		1.783.000,00	1.783.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(13.067.256.864,00)	(10.250.007.602,00)
JUMLAH ASSET TETAP		5.415.390.537,00	7.672.738.711,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00

URAIAN	REF	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		21.050.000,00	21.050.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		2.033.447.220,00	1.922.913.830,00
Aset Lain-lain		601.376.584,00	601.376.584,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-1.018.494.350,00	-1.018.494.350,00
JUMLAH ASET LAINNYA		1.637.379.454,00	1.526.846.064,00
JUMLAH ASET		7.060.598.924,00	9.230.474.516,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Beban		330.136.354,00	197.278.191,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		330.136.354,00	197.278.191,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		330.136.354,00	197.278.191,00
EKUITAS			
EKUITAS		6.730.462.570,00	9.033.196.325,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		7.060.598.924,00	9.230.474.516,00

Manado, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19710803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Data Umum SKPD

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

Fungsi SKPD :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi informatika persandian dan statistik daerah
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan e-government pemerintah daerah
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi pelaksanaan rumusan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informasi
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

1.1.2 Struktur Organisasi

Untuk Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah di bantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala-kepala Bidang dan Kepala-kepala Seksi yang membawahi Bidang masing-masing terlampir.

1.1.3. Data Kepegawaian

I. PEJABAT STRUKTURAL		:	16	ORANG
ESELON II	:	1	ORANG	
ESELON III	:	4	ORANG	
ESELON IV	:	11	ORANG	

URAIAN	JUMLAH
KEPALA DINAS	1 ORANG
SEKRETARIAT	15 ORANG
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	15 ORANG
BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	10 ORANG
BIDANG PERSANDIAN	9 ORANG
TOTAL	50 ORANG

1.2. Peranan Pelaporan dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadaanya.

1.2.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sejak Tahun 2003 beberapa peraturan perundungan yang mengatur pengelolaan keuangan telah diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2005 mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat peranan pelaporan dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

b. **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN ORGANISASI**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

c. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

d. BAB IV PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan; pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

e. BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN ORGANISASI

2.1. Administrasi

Untuk **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara** Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan dengan Anggaran sebesar Rp6.151.678.132,00 dan Realisasi sebesar Rp5.670.691.269,00 atau 92,18% dan masih terdapat sisa Anggaran Rp480.986.863,00 atau 7,82%.

2.2. Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja SKPD **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara** pada Tahun Anggaran 2021 realisasi belanja sebesar Rp18.570.929.770,00 Dan terdapat Rp177.634.872,00 Merupakan akumulasi anggaran per kegiatan yang tidak terealisasi.

2.3. Fisik

Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp24.241.621.039,00 atau 97,35% dan dalam pelaksanaannya realisasi fisik program dan kegiatan telah dilaksanakan 100%

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan gabungan (konsolidasi) dari seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD.

3.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan SKPD.

3.3 Basis Akuntansi

Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan asumsi bahwa:

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan.
- b. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010). Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka memperbandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD/Perubahan APBD.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas dan untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan LO, beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.4 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*Historical Cost*) tanpa memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka-angka disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

3.5 Kesesuaian Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-

lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan ini disusun secara *double entries* atas seluruh pendapatan LRA, pendapatan LO/ penerimaan dan belanja, beban/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

3.6 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan LRA menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Lampiran Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengakuan atas pendapatan LRA dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (*Cash Basis*) dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

a. Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Ekuitas.
- 3) Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sedangkan transfer keluar merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Utara.
- 3) Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan dan transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

d. Surplus atau Defisit

- 1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 2) Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

e. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- 4) Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 5) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- 1) Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan.
- 2) SiLPA/SiKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

3.7 Kebijakan Akuntansi atas Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021.

Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

a. Kas di Kas Daerah

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
- 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
- 3) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Fihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
- 4) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
- 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.
- 3) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

- 1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
- 2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

d. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
- 2) Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perlehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Piutang

- 1) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
- 2) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

- 3) Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo.
 - b. Kualitas kurang lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun s/d 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
 - c. Kualitas diragukan adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun s/d 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
 - d. Kualitas macet adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
- 4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
 - a. 0 % dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10 % dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - c. 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 - d. 100 % dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- 5) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

f. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.

- 3) Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (*periodic method*) berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaannya sulit diidentifikasi.
- 4) Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil inventarisasi.
- 5) Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.
- 6) Metode sistematis FIFO (*First In First Out*) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.
- 7) Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.
- 8) Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- 9) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Investasi Permanen

- 1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk Investasi Permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan atau metode biaya.
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan (metode ekuitas).
- 3) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Nonpermanen

- 1) Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk Investasi Nonpermanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
- 2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkaitan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 5) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Sebagai acuan untuk kebijakan kapitalisasi salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara :
 - a) Pengeluaran untuk per unit Peralatan dan Mesin berupa peralatan kantor, barang elektronika, alat olahraga, hewan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya

- sama dengan atau lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per item bahan, dan untuk kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan normalisasi sungai bernilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Untuk aset Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi point 1 dan 2.
 - 6) Kebijakan penyusutan aset tetap, sebagai konsekuensi penggunaan aset tersebut harus ditetapkan pemerintah daerah agar tercapai keseragaman sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
 - a) Pengakuan penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - b) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - c) Untuk penyusutan aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
 - d) Pengukuran penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - e) Metode yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)
Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan.
 - f) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerajan.
 - g) Penyusutan aset tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai aset tetap dan disajikan secara akumulasi.

- 7) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- 8) Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 9) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
- 10) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 11) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 12) Kebijakan penyusutan aset tetap belum diterapkan karena Pemerintah Daerah belum menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan dimaksud.

d. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

- 3) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).

Klasifikasi kewajiban meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat Kewajiban timbul.
- 4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 5) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- 2) Kewajiban jangka panjang meliputi: Utang Dalam Negeri Perbankan, dan Utang jangka Panjang lainnya.

- 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SILPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

a. Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

b. Ekuitas Dana Investasi

Mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, Yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

3.8 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional menyediakan informasi :

- (a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
- (b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi,

efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- (c) Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- (d) Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Kebijakan akuntansi terkait dengan Laporan Operasional (LO):

a. Pendapatan – LO.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang besangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa.
- 3) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*).
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 4) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa :
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.
 - b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 6) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.
 - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan

kas.

- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

7) Pengukuran pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikonpensasikan dengan beban).

b. Beban.

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban terdiri dari :
 - a. Beban Operasi.
 - b. Beban Transfer.
 - c. Beban Non Operasional.
 - d. Beban Luar Biasa.
- 3) Beban dapat diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu :

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas.
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 4) Pengukuran beban berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah

3.9 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.4.1. PENDAPATAN

4.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pendapatan Asli Daerah T.A. 2021.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
a.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,0	0,00	0,00

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
b.	Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	89.100.000,00	89.100.000,00	100,00	750.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak ada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah T.A. 2021.

4.4.2. BELANJA

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
BELANJA	24.900.242.774,00	24.241.621.039,00	97,35	17.385.531.863,00

Belanja T.A. 2021 dianggarkan sebesar 24.900.242.774,00 dan direalisasikan sebesar 24.241.621.039,00 atau 97,35% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 17.385.531.863,00 maka terjadi kenaikan sebesar 6.856.089.176,00 atau 27.53%. Belanja daerah terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal. Pada Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan dan direalisasikan Belanja-Belanja tersebut sebagai berikut:

		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	2419.2911.156,00	23.568.936.561,00	97,42	16.262.594.464,00
2	Belanja Modal	707.331.618,00	672.684.478,00	95,10	1.122.937.399,00
	Jumlah	24.900.242.774,00	24.241.621.039,00	97,35	17.385.531.863,00

4.4.2.1. BELANJA OPERASI

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
A. Belanja Operasi	24.192.911.156,00	23.568.936.561,00	97,42	16.262.594.464,00

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp24.192.911.156,00 dan direalisasikan sebesar Rp23.568.936.561,00 atau 97,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp16.262.594.464,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.306.342.097,00 atau 30,20%. Belanja Operasi diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Rincian masing-masing jenis belanja diuraikan sebagai berikut:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
a. Belanja Pegawai	6.170.278.132,00	5.687.741.269,00	92,17	5.550.164.904,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp6.170.278.132,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.687.741.269,00 atau 92,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.550.164.904,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp137.576.365,00 atau 2,23%.

Belanja Pegawai terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.608.748.132,00	3.196.222.199,00	88,57	3.236.759.053,00
b.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.542.930.000,00	2.474.459.070,00	97,30	2.313.405.851,00
c.	Belanja Uang Lembur				
d.	Belanja Gaji Ketigabelas				
	Jumlah	6.170.278.132,00	5.687.741.269,00	92,17	5.550.164.904,00

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp3.196.222.199,00 atau 88,57% dengan jumlah pegawai sebanyak 53 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Golongan I	0 orang
2)	Golongan II	6 orang
3)	Golongan III	37 orang
4)	Golongan IV	6 orang
JUMLAH :		49 orang

- b. Belanja Tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terealisasi sebesar Rp2.474.469.070,00 atau 97,30%.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
b. Belanja Barang dan Jasa	15.762.514.612,00	15.621.076.880,00	99,10	10.712.429.560,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp15.762.514.612,00 dan direalisasikan sebesar Rp15.621.076.880,00 atau 99,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp10.712.429.560,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.908.647.320,00 atau 31,14%.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1)	Belanja Bahan Pakai Habis	493.798.646,00	445.254.295,00	90,17	252.085.829
2)	Belanja Jasa Kantor	14.992.642.797,00	14.944.012.153,00	99,68	9.429.799.079,00
3)	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.149.169,00	50.694.556,00	82,90	
4)	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
5)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.127.000,00	73.225.412,00	77,79	
6)	Belanja Perjalanan Dinas	104.797.000,00	91.890.464,00	87,68	23.6.615.781,00
7)	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				80.701.171,00
8)	Belanja Cetak dan Penggandaan				122.087.700,00
9)	Belanja Makanan dan Minuman				225.400.000
10)	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				41.600.000,00
11)	Belanja Pemeliharaan				17.000.000,00
12)	Belanja Honorarium Non PNS				510.000.000,00
	Jumlah	15.762.514.612,00	15.621.076.880,00	99,10	10.712.429.560,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp15.762.514.612,00 dan realisasinya sebesar Rp15.621.076.880,00 atau 99,10% yang terdiri dari:

- 1) Belanja Bahan Pakai Habis dianggarkan sebesar

Rp493.798.646,00 dan realisasinya sebesar Rp445.254.295,00 atau 90,17% terdiri dari :

- a. Belanja Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.220.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.165.000,00 atau 97,52%.
- b. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dianggarkan sebesar Rp 7.037.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.800.602,00 atau 96,63%.
- c. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp25.289.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.231.910,00 atau 64,19%.
- d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp120.277.372,00 dan terealisasi sebesar Rp 103.238.346,00 atau 85,83%.
- e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover dianggarkan sebesar Rp48.819.336,00 dan terealisasi sebesar Rp 41.997.871,00 atau sebesar 86,27%.
- f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dianggarkan sebesar Rp98.118.618,00 dan terealisasi sebesar Rp94.892.800,00 atau sebesar 96,71%.
- g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos dianggarkan sebesar Rp7.536.628,00 dan terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau sebesar 99,51%.
- h. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer sebesar Rp15.025.002,00 dan terealisasi sebesar Rp 12.546.961,00 atau sebesar 83,51%.
- i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor sebesar Rp 9.974.999,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.919.700,00 atau sebesar 99,45%.
- j. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik sebesar Rp 11.949.658,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.941.173,00 atau sebesar 99,93%.
- k. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas sebesar Rp44.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp Rp44.000.000,00 atau sebesar 100%.
- l. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp 27.173.783,00 dan terealisasi sebesar Rp 26.959.932,00 atau sebesar 99,21%.
- m. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp52.627.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.310.000,00 atau sebesar 82,30%.
- n. Belanja Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp 23.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.750.000,00 atau sebesar 100%.

- 2) Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar 14.992.642.797,00 dan realisasinya sebesar 14.944.012.153,00 atau 99,68% terdiri dari :
- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp9.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.400.000,00 atau 95,92%.
 - b. Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 374.143.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 349.410.905,00 atau 93,39%.
 - c. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp675.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp657.611.585,00 atau 97,36%.
 - d. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp675.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp657.611.585,00 atau 97,36%.
 - e. Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp422.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp422.000.000,00 atau 100%.
 - f. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp 43.043.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 43.043.000,00 atau 100%.
 - g. Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp 48.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 48.731.250,00 atau 99,96%.
 - h. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp1.216.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.216.000.000,00 atau 100%.
 - i. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp8.345.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.344.573.628,00 atau 100%.
 - j. Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp 8.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.993.285,00 atau 87,42%.
 - k. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp3.840.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.840.000.000,00 atau 100%.
 - l. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp10.462.797,00 dan terealisasi sebesar Rp6.248.500,00 atau 59,72%.
- 3) Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp61.149.169,00 dan realisasinya sebesar Rp50.694.556,00 atau 82,90% terdiri dari :
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp54.453.310,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.745.680,00 atau 82,17%.
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp3.277.679,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.687.902,00 atau 82%.
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dianggarkan sebesar Rp3.418.180,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.260.974,00 atau 95,40%.

- 4) Belanja Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp16.000.000,00 atau 100% terdiri dari :
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp16.000.000,00 atau 100%
- 5) Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp94.127.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.225.412,00 atau 77,79% terdiri dari :
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan dianggarkan sebesar Rp74.646.000,00 dan terealisasi sebesar Rp55.164.127,00 atau 73,90%.
 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua dianggarkan sebesar Rp4.081.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.076.285,00 atau 99,88%.
 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp8.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.185.000,00 atau 93,01%.
 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin dianggarkan sebesar Rp6.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.800.000,00 atau 87,88%.
- 6) Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp104.797.000,00 dan realisasinya sebesar Rp91.890.464,00 atau 87,68% terdiri dari :
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan sebesar Rp93.472.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.490.464,00 atau 92,53%.
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dianggarkan sebesar Rp11.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau 47,68%.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
c. Belanja Hibah	2.260.118.412,00	2.260.118.412,00	100	0,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar 2.260.118.412,00 dan direalisasikan sebesar 2.260.118.412,00 atau 100%. Yaitu Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (KPID Provinsi Sulawesi Utara)

4.4.2.2. BELANJA MODAL

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal	707.331.618,00	672.684.478,00	95,10	1.122.937.399,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp707.331.618,00 dan direalisasikan sebesar Rp672.684.478,00 atau 95,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.122.937.399,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp450.252.921,00 atau 63,66%. Belanja Modal merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Mesin dan Peralatan, yang terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	707.331.618,00	672.684.478,00	95,10	1.122.937.399,00

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Modal Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp2.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 98,04% yang terdiri dari:
 - a) Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp2.040.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 98,04%.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp58.567.047,00 dan realisasi sebesar Rp57.054.543,00 atau 97,42% yang terdiri dari :
 - a) Pengadaan Alat Pendingin dianggarkan sebesar Rp29.493.749,00 dan terealisasi sebesar Rp28.199.997,00 atau 95,61%.
 - b) Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dianggarkan sebesar Rp29.073.298,00 dan terealisasi sebesar Rp28.854.546,00 atau 99,25%.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp47.160.122,00 dan realisasi sebesar Rp44.160.000,00 atau 93,64% yang terdiri dari:
 - a) Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dianggarkan sebesar Rp7.160.120,00 dan terealisasi sebesar Rp7.160.000,00 atau 99,99%.
 - b) Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat sebesar Rp40.000.002,00 dan terealisasi sebesar Rp37.000.000,00 atau 92,5%.

- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Studio dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100% yang terdiri dari:
 - a) Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film dianggarkan Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100%
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp2.999.999,00 dan terealisasi sebesar Rp2.999.000,00 atau 99,97% yang terdiri dari:
 - a) Pengadaan Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp2.999.999,00 dan terealisasi sebesar Rp2.999.000,00 atau 99,97%.
- 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit dianggarkan sebesar Rp357.486.700,00 dan terealisasi sebesar Rp330.780.295,00 atau 92,53% yang terdiri dari:
 - a) Pengadaan Personal Computer dianggarkan sebesar Rp357.486.700,00 dan terealisasi sebesar Rp330.780.295,00 atau 92,53%.
- 7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer dianggarkan sebesar Rp189.077.750,00 dan terealisasi sebesar Rp185.690.640,00 atau 98,21% yang terdiri dari:
 - a) Pengadaan Peralatan Personal Computer dianggarkan sebesar Rp3.7235.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.002.000,00 atau 91,32%.
 - b) Pengadaan Peralatan Jaringan dianggarkan sebesar Rp151.842.750,00 dan terealisasi sebesar Rp151.688.640,00 atau 99,90%.

4.2. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 disajikan komparatif dengan tahun 2021.

Ringkasan Laporan Operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

NO. REKENING	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	PENDAPATAN –LO	89.100.000,00	750.000,00	88.350.000,00	11.78
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	89.100.000,00	750.000,00	88.350.000,00	11.78
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah –LO	89.100.000,00	750.000,00	88.350.000,00	11.78
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
*8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
*8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
*8 . 3 . 2	Dana Darurat – LO	0.00	0.00	0.00	0.00
*8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya –LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BEBAN	26.542.104.794,00	20.082.980.996,00	3.641.874.536,00	18,13
9 . 1 . 1	Beban Pegawai –LO	5.700.900.811,00	5.562.972.045,00	137.928.766,00	2,48

9.1.2	Beban Barang dan Jasa	15.763.836.309,00	10.709.425.319,00	5.054.410.990,00	47,20
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	2.260.118.412,00	0,00	2.260.118.412,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.817.249.262,00	3.810.563.632,00	-993.314.370,00	-35,26
9.1.8	Beban Penyiihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)	(6.370.773.798,00)	24,08
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)	(6.370.773.798,00)	24,08
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)	(6.370.773.798,00)	24,08

Penjelasan rinci Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.1. Pendapatan – LO	89.100.000,00	750.000,00

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan – LO Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021 sebesar Rp89.100.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar 750.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar 88.350.000,00 atau (11,78)%, yang terdiri dari :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah– LO	89.100.000,00	750.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2021 sebesar Rp89.100.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar 750.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar 88.350.000,00 atau (11,78)%, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Lain-lain PAD Yang Sah –LO	89.100.000,00	750.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2021 sebesar Rp89.100.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar 750.000,00 maka mengalami Kenaikan sebesar 88.350.000,00 atau (11,78)%.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.1.2. Pendapatan Transfer –LO	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2021 dan tahun 2020.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO tahun 2021 dan tahun 2020.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO tahun 2021 dan tahun 2020.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya – LO	0,00	0,00

Untuk Tahun Anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 tidak ada realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d.	Bantuan Keuangan –LO	0,00	0,00

Untuk Tahun Anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi Bantuan Keuangan – LO.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0,00	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
a.	Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00

Untuk Tahun Anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 tidak ada realisasi Pendapatan Hibah – LO.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
b.	Dana Darurat – LO	0,00	0,00

Untuk Tahun Anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 tidak ada realisasi Dana Darurat – LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
c.	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00

Untuk Tahun Anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 tidak ada realisasi Pendapatan Lainnya – LO.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	
4.2.2.	Beban	26.542.104.794,00	20.082.980.996,00

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar Rp26.542.104.794,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.082.980.996,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.641.874.536,00 atau 18,13% terdiri dari :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Beban Pegawai - LO	5.700.900.811,00	5.562.972.045,00

Realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2021 sebesar Rp5.700.900.811,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.562.972.045,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.928.766,00 atau (2,48)%.

Rincian realisasi Beban Pegawai – LO tahun 2021 menurut objek beban sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021	5.687.741.269,00
- Beban TKD Pegawai Bulan Desember 2021	210.437.733,00
- Beban TKD Pegawai Bulan Desember 2020	(197.278.191,00)
Beban Pegawai – LO	5.700.900.811,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Beban Barang dan Jasa- LO	15.763.836.309,00	10.709.425.319,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO tahun 2021 sebesar Rp15.763.836.309,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp10.709.425.319,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.054.410.990,00 atau 47,20%.

Rincian realisasi Beban Barang dan Jasa – LO tahun 2021 menurut objek beban sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021	15.621.076.880,00
- Beban Persediaan TA 2020	30.889.741,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.698.621,00
	15.771.665.242,00
- Beban Persediaan TA 2021	(7.828.933,00)
Beban Barang Jasa – LO	15.763.836.309,00

Rincian Beban LO sebagai berikut :

1. Beban Kegiatan sebesar Rp150.588.362,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	JENIS	HUTANG BEBAN (Rp)
1	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah	Persediaan TA 2020	30.889.741,00
2		Beban Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.698.621,00
		TOTAL	150.588.362,00

2. Beban persediaan ATK TA 2021 sebesar Rp7.828.933,00

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c.	Beban Bunga - LO	0,00	0,00

Tidak ada realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2021.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d.	Beban Subsidi - LO	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi belanja Subsidi tahun anggaran 2021.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e. Beban Hibah - LO	2.260.118.412,00	0,00

Tidak ada Realisasi belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.260.118.412,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
f. Beban Bantuan Sosial -LO	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
g. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	2.817.249.262,00	3.810.563.632,00

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.817.249.262,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
h. Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
i. Beban Lain-lain	0,00	0,00

Realisasi Beban Lain-lain tahun anggaran 2021 sebesar Rp.0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
j. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
k. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
l. Beban Trnasfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
m. Beban Trnasfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
n. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
o. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Transfer Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.3. Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00

Tidak ada realisasi Kegiatan Non Operasional merupakan penjualan aset non lancar atau penyelesaian kewajiban jangka panjang

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Surplus Penjualan Aset/Non Lancar	0,00	0,00

Surplus Penjualan Aset/non Lancar –LO tidak terealisasi sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO tidak terealisasi sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO tidak terealisasi sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d. Defisit Penjualan Aset Non Lancar- LO	0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO tidak terealisasi sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LD	0,00	0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO tidak terealisasi sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
f. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO tidak terealisasi sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)

POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa – LO tidak terealisasi sebesar Rp0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Beban Luar Biasa	0,00	0,00

Tidak ada Realisasi Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.6. Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.2.7 Surplus/Defisit LO	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LO dan Beban tahun anggaran 2021 dihasilkan Defisit – LO sebesar (26.453.004.794,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan – LO	89.100.000,00
Beban	26.542.104.794,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(26.453.004.794,00)

4.3. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.3.1 Ekuitas Awal	9.033.196.325,00	12.063.267.798,00

Saldo awal ekuitas tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.033.196.325,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.063.267.798,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp3.030.071.473,00 atau (33%).

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.3.2 Surplus/Defisit-LO	(26.453.004.794,00)	(20.082.230.996,00)

Defisit - LO sebesar Rp(26.453.004.794,00) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 20.082.230.996,00 maka mengalami kenaikan defisit sebesar Rp6.370.773.798,00 atau 24,08%

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.3.3.1 Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00

Tidak koreksi nilai persediaan pada TA 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.3.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00

Tidak ada nilai selisih revaluasi aset tetap pada TA 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.3.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	2.250.000,00	332.622.340,00

Koreksi ekuitas lainnya pada TA 2021 sebesar Rp2.250.000,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp332.622.340,00 maka mengalami Penurunan sebesar Rp330.372.340,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.3.4 Kewajiban Dikonsolidasikan	Untuk 24.152.521.039,00	17.384.781.863,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.152.521.039,00 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2021. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.767.739.176,00 atau 28,02%.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.3.5 Ekuitas Akhir	6.730.462.570,00	9.033.196.325,00

Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.730.462.570,00 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2021. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.302.733.783,00 atau (34,21)%.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

4.4.1. ASET

4.4.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan telah disetor ke Kas Negara/Daerah.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Tidak ada Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Piutang	0,00	0,00

Tidak ada Piutang sampai dengan 31 Desember 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d. Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Tidak ada Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e. Persediaan	7.828.933,00	30.889.741,00

4.4.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Tidak ada Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Investasi Non Permanen	0,00	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Investasi Permanen	0,00	0,00

4.4.1.3. ASET TETAP

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.415.390.537,00 Masing-masing Aset Tetap dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Tanah	0,00	0,00

Tidak ada Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2021.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Peralatan dan Mesin	18.128.182.295,00	17.568.281.207,00

Selama T.A. 2021 terjadi kenaikan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp559.901.088,00 Kenaikan tersebut berasal dari penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin dengan perincian sebagai berikut:

➢ Penambahan nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp559.901.088,00, yaitu :

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A. 2021 sebesar RP672.684.478,00.
- 2) Reklasifikasi Aset ekstra compatible (Belanja Modal Alat Rumah Tangga) yang tidak dapat dikapitalisasi dibawah Rp.1.000.000 TA.

2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik daerah sebesar Rp2.250.000,00

3) Reklasifikasi dari Peralatan Komputer yang seharusnya menambah Aset Tidak Berwujud Rp110.533.390,00.

Posisi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021, terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	KENDARAAN DINAS BERMOGOR PERORANGAN	3252.994.512,00			3.252.994.512,00
2	KENDARAAN BERMOGOR BERODA DUA	342.005.000,00			342.005.000,00
3	KENDARAAN BERMOGOR KHUSUS	219.200.000,00			219.200.000,00
4	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	160.875.000,00			160.875.000,00
5	UNIVERSAL TESTER	12.800.000,00			12.800.000,00
6	MESIN KETIK	5.900.000,00			5.900.000,00
7	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	99.000.000,00			99.000.000,00
8	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	334.921.500,00	2.000.000,00		336.921.500,00
9	ALAT KANTOR LAINNYA	130.912.000,00			130.912.000,00
10	MEUBELAIR	13.663.186.50,00			13.663.186.50,00
11	ALAT PEMBERSIH	3.650.000,00			3.650.000,00
12	ALAT PENDINGIN	452.833.750,00	28.199.997,00		481.033.747,00
13	ALAT DAPUR	16.754.000,00			16.754.000,00
14	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	517.880.100,00	26.604.546,00		544.484.646,00
15	MEJA KERJA PEJABAT	82.265.000,00			82.265.000,00
16	MEJA RAPAT PEJABAT	40.150.000,00			40.150.000,00
17	KURSI KERJA PEJABAT	72.920.000,00	7.160.000,00		80.080.000,00
18	KURSI RAPAT PEJABAT	16.775.000,00			16.775.000,00
19	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	12.540.000,00			12.540.000,00
20	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	144.200.000,00	37.000.000,00		51.420.000,00
21	PERALATAN STUDIO VISUAL	618.666.600,00			618.688.600,00
22	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	164.914.600,00	50.000.000,00		214.914.600,00
23	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	533.200.000,00	299.900.000,00		6.331.000,00
24	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	1.744.000,00			1.744.000,00
25	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	25.707.000,00			25.707.000,00
26	ALAT-ALAT SANDI	1.730.000,00			1.730.000,00
27	KOMPUTER JARINGAN	45.986.000,00			45.986.000,00
28	PERSONAL KOMPUTER	181.085.880.00,00	220.246.905,00		2.031.105.705,00
29	PERALATAN MAINFRAME	5.304.440.330,00			5.304.440.330,00
30	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	385.944.000,00	34.002.000,00		419.946.000,00
31	PERALATAN JARINGAN	2.018.021.365,00	151.688.640,00		2.169.710.005,00
32	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	29.800.000,00			29.800.000,00
	JUMLAH	17.568.281.207,00	559.901.088,00		18.128.182.295,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Gedung dan Bangunan	352.682.106,00	352.682.106,00

Selama T.A. 2021, tidak ada penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan.

Posisi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Bangunan Gedung	119682.900,00	0,00	0,00	119682.900,00
2	Monumen dan Tugu	232999.206,00	0,00	0,00	232.999.206,00
	Jumlah	352.682.106,00	0,00	0,00	352.682.106,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d . Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00

Tidak ada Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e. Aset Tetap Lainnya	1.783.000,00	1.783.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya tidak mengalami penambahan dan pengurangan.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Tidak ada Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
g. Akumulasi Penyusutan	(13.026.383.180,00)	(10.250.007.602)

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh.

Total akumulasi penyusutan sebesar Rp(13.026.383.180,00) (terlampir) merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2021 sehingga mengurangi total aset tetap tahun anggaran 2021, akumulasi tersebut merupakan total akumulasi penyusutan secara keseluruhan baik aset tetap maupun aset yang sudah dihapuskan dan dipindahkan ke aset lainnya karena rusak berat. Akumulasi penyusutan tahun anggaran 2021 tidak menyajikan nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang sebenarnya sehingga dikoreksi, yaitu:

NO.	NAMA SKPD	KETERANGAN	SALDO AKHIR 2021	KOREKSI	SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.552.868.413,0 0	-	-2.937.842.991,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	-6.400.000,00	-	-8.960.000,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	-573.430.585,00	-	-692.407.553,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	1.702.716.004,0 0	-	-2.028.867.421,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	-434.684.031,00	-	-476.230.329,00
		Akumulasi Penyusutan Alat Studio	-997.785.300,00	-	-1.464.346.644,00
		Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	1.571.383.358,0 0	-	-2.063.279.122,00
		Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	2.324.602.812,0 0	-	-3.301.290.171,00
		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	-29.800.000,00	-	-29.800.000,00
		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-10.364.000,00	-	-12.749.140,00
Jumlah			-10.250.007.602,00		-13.067.256.864,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan 31-12-2021	(10.250.007.602,00)
Beban Penyusutan 2021	(2817.249.262,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan 2021	0,00
Akumulasi Penyusutan 31-12-2021	(13.067.256.864,00)
Total Penyusutan	(13.067.256.864,00)

NO	NAMA SKPD/ UNIT KERJA	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	Semester I	Semester II	AKUMULASI
					PENYUSUTAN 31-Dec-2021
1	2	4	5	6	7
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	(10250007602,00)	(140356309900)	(1413686163,00)	(13.067.256.864,00)
	TOTAL	(10.250.007.602,00)	(1.403.563.099,00)	(1.413.686.163,00)	(13.067.256.864,00)

4.4.1.4. DANA CADANGAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan 2020.

4.4.1.5. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar 1.637.379.454,00 yang terdiri dari :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Tagihan Jangka Panjang	21.050.000,00	21.050.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Tidak ada saldo kemitraan dengan pihak ketiga sampai dengan per 31 Desember 2021

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Aset Tidak Berwujud	2.033.447.220,00	1.922.913.830,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.033.447.220,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.922.913.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.533.390,00 atau 5 %.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d. Aset Lain-lain	601.376.584,00	601.376.584,00

Terhadap Aset Lain-Lain pada T.A. 2021 Tidak ada penambahan atau pengurangan jumlahnya tetap sama dengan T.A. 2020 sebesar Rp 601.376.584,00.

4.4.2. KEWAJIBAN

4.4.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp197.278.191,00 terdiri dari:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Utang Beban	330.136.354,00	197.278.191,00

Utang beban merupakan kewajiban yang diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Utang beban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Utang Beban Pegawai (Tambahan Penghasilan PNS) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah yang belum dibayarkan bulan Desember 2021 yang menjadi beban TA 2021 sebesar 330.136.354,00 dan Tagihan Internet Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah yang belum dibayarkan bulan Desember 2021 sebesar Rp 119.698.621,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Selama T.A. 2021, tidak ada Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.4.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat, Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020.

4.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.4.3 EKUITAS	6.730.462.570,00	9.033.196.325,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4.4.3. JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.060.598.924,00	10.581.591.206,00

Posisi saldo Ekuitas Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2021, dengan rincian:

- a. Kewajiban Jangka Pendek Rp 330.136.354,00
 - b. kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00
 - c. Ekuitas Rp 6.730.462.570,00
- Jumlah** **Rp 7.060.598.924,00**

BAB V

PENUTUP

Hakikat dari otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui APBD.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp24.241.621.039,00 atau 95,06% dari Belanja operasi realisasi sebesar Rp23.568.936.561,00 atau 97,42%, Belanja Modal realisasi sebesar Rp672.684.478,00 atau 95,10%.

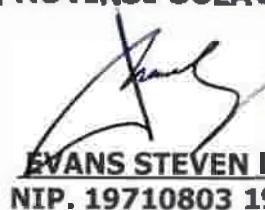
Berdasarkan Neraca SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2021, dapat diketahui bahwa:

- a. Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp7.060.598.924,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.828.933,00 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00 Aset Tetap sebesar Rp5.415.390.537,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.637.379.454,00. Secara keseluruhan, nilai Aset mengalami penurunan sebesar Rp2.169.875.592,00 dari nilai Aset tahun sebelumnya sebesar Rp9.230.474.516,00.
- b. Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp330.136.354,00 terdiri dari Utang Beban sebesar Rp330.136.354,00.
- c. Ekuitas (kekayaan bersih) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp6.730.462.570,00.

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah T.A. 2021 realisasi penerimaan pendapatan daerah tidak sepenuhnya terealisasi dari target yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara TA 2021, selain itu LKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Manado, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**


EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19710803 199803 1005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Jl. 17 Agustus No. 69 Telp. (0431) 865559 Fax (0431) 865471 Manado 95119
Website : <http://sulutprov.go.id> E-mail : dkips@sulutprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN

Nomor : 029 /214/DKIPS/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MEISKE M. TEROK, SE
NIP : 19650328 198602 2 001
Jabatan : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
2. Nama : RENSY R. MANARISIP, ST
NIP : 19811203 201001 1 005
Jabatan : PENGURUS BARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menyatakan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Barang Persediaan s.d. Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut :

31

ALAT TULIS KANTOR

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Nilai Persediaan				
				Saldo Awal Neraca Audited (Rp.) 31 Desember 2020)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.) (31 Desember 2021)	Saldo Stock Opname Barang (31 Desember 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kertas HVS F4 70 gr	87	57.500	5.002.500	0	5.002.500	0	0
2	Kertas HVS A4 70 gr	15	51.500	772.500	0	772.500	0	0
3	Kertas HVS A4 70 gr	2	52.500	105.000	0	105.000	0	0
4	Map Folio Tebal	116	4.200	487.200	0	487.200	0	0
5	Odner Foto	34	38.500	1.309.000	0	1.309.000	0	0
6	Tinta Warna Hitam Epson 664	9	125.000	1.125.000	0	1.125.000	0	0
7	Tinta Warna Kuning Epson 664	3	125.000	375.000	0	375.000	0	0
8	Tinta Warna Merah Epson 664	4	125.000	500.000	0	500.000	0	0
9	Tinta Warna Biru Epson 664	3	125.000	375.000	0	375.000	0	0
10	Tinta Canon GL 790 warna	3	100.000	300.000	0	300.000	0	0
11	Tinta Stampel 30 cc	1	11.900	11.900	0	11900	0	0
12	Map Biasa	95	2.500	237.500	0	237.500	0	0
13	Binder Clips No. 111	4	6.500	26.000	0	26.000	0	0
14	Tp Ex	5	10.000	50.000	0	50.000	0	0
15	Lem Stick Sedang	6	9.500	57.000	0	57.000	0	0
16	Cover Plastik Bening F4	1	48.000	48.000	0	48.000	0	0
17	Tinta Warna Kuning Canon	15	79.000	1.185.000	0	1.185.000	0	0

18	Tinta Warna Hitam Canon	16	79.000	1.264.000	0	1.264.000	0	0
19	Tinta Warna Merah Canon	15	79.000	1.185.000	0	1.185.000	0	0
20	Tinta Warna Biru Canon	15	79.000	1.185.000	0	1.185.000	0	0
21	Amplop Besar	1	29.600	29.600	0	29.600	0	0
22	Paper Clips No. 5	2	5.000	10.000	0	10.000	0	0
23	Paper Clips No. 3	1	3.500	3.500	0	3.500	0	0
24	Binder Clips No. 200	1	19.000	19.000	0	19.000	0	0
25	Binder Clips No. 260	1	24.200	24.200	0	24.200	0	0
26	Ballpoint Ballinner	21	31.000	651.000	0	651.000	0	0
27	Ballpoint Standart	31	4100	127.100	0	127.100	0	0
TOTAL				16.465.000	0	16.465.000	0	0
1	Kertas HVS F4 80 gr	8	68.000	0	544.000	0	544.000	544.000
1	Kertas HVS F4 80 gr	15	68.182	0	1.022.730	0	1.022.730	1.022.730
2	Kertas HVS A4 80 gr	10	60.000	0	600.000	0	600.000	600.000
3	Map Folio Diamon	91	3.455	0	314.405	0	314.405	314.405
4	Tinta Infus Canon	11	153.409	0	1.687.499	0	1.687.499	1.687.499
5	Pilot Pen Balliner Warna Biru	13	24.375	0	316.875	0	316.875	316.875
6	Pilot Pen Balliner Warna Hitam	15	24.375	0	365.625	0	365.625	365.625
7	Ballpoint Standart	36	2.364	0	85.104	0	85.104	85.104
8	Tinta Infus Canon	4	113.636	0	454.544	0	454.544	454.544
9	Odher Jumbo Bambi 1033	10	50.000	0	500.000	0	500.000	500.000
10	Kertas HVS F4 70 gr	11	60.000	0	660.000	0	660.000	660.000
11	Buku Tulis Garda 100 Lbr	3	18.182	0	54.546	0	54.546	54.546
TOTAL				16.465.000	6.605.328	16.465.000	6.605.328	6.605.328

Terbilang : Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah

ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Persediaan				
				Saldo Awal Neraca Audited (Rp.) 31 Desember 2020)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.) (31 Desember 2021)	Saldo Stock Opname Barang (31 Desember 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tisu Basah Mitu Botol	18	17.000	306.000	0	306.000	0	0
2	Tisu Sedang Paseo	5	18.500	92.500	0	92.500	0	0
3	Sunligh 755 ml	8	17.000	136.000	0	136.000	0	0
4	Wipol 780 ml	10	20.000	200.000	0	200.000	0	0
5	Tisu Basah Wetties Botol	17	23.000	391.000	0	391.000	0	0
6	Portex 500 ml	3	14.000	42.000	0	42.000	0	0
7	Cling Pembersih Kaca	14	9.500	133.000	0	133.000	0	0
8	Yun Sabun Pencuci Tangan Botol	3	30.000	90.000	0	90.000	0	0
9	Super Pel	2	13.000	26.000	0	26.000	0	0
10	Hand Sanitizer Nuvo 250 ml	9	25.000	225.000	0	225.000	0	0
11	Hand Sanitizer Nuvo 85 ml	13	10.000	130.000	0	130.000	0	0
12	Hand Sanitizer Nuvo 50 ml	2	9.000	18.000	0	18.000	0	0
13	Detol Antiseptik	1	50.000	50.000	0	50.000	0	0
14	Antis Gelon	2	370.000	740.000	0	740.000	0	0

15	Tisu Nice 900 gr	3	39.000	117.000	0	117.000	0	0
16	Novo Handsanitizer	5	17.000	85.000	0	85.000	0	0
17	Detol Handwash	5	20.000	100.000	0	100.000	0	0
18	Sapu Lanta	5	74.556	372.780	0	372.780	0	0
19	Sapu dan Ember Pel	3	276.136	828.408	0	828.408	0	0
20	Tempat Sampah Pakai Penutup	4	138.068	552.272	0	552.272	0	0
21	Tempat Sampah Jumbo Biasa	2	24.852	49.704	0	49.704	0	0
22	Ember Pakai Penutup	4	82840	331.360	0	331.360	0	0
23	Gayung	4	22.090	88.360	0	88.360	0	0
24	Kep Sampah	3	44.181	132.543	0	132.543	0	0
25	Sikat Lantai	3	60.750	182.250	0	182.250	0	0
26	Sapu Tolak Air	2	66.272	132.544	0	132.544	0	0
27	Sikat Closed	2	44.181	88.362	0	88.362	0	0
28	Ember 6 Liter	2	71.795	1435.90	0	1435.90	0	0
29	Ember 80 Liter	2	220.909	441.818	0	441.818	0	0
30	Kemuceng Bulu Ayam	2	44181	88.362	0	88.362	0	0
TOTAL				6.313.853	0	6.313.853	0	0
1	Wipol	5	37500	0	187.500	0	187.500	187.500
2	Sunlight	2	29.091	0	58.182	0	58.182	58.182
3	Tissue Basah	4	21.000	0	84.000	0	84.000	84.000
4	Tissue Basah Wetties Botol Family 90s	1	24.200	0	24.200	0	24.200	24.200
5	Kamper Pimping Swallow	8	26.400	0	211.200	0	211.200	211.200
6	Cairan Pembersih Kaca 440 ml	5	10.450	0	52.250	0	52.250	52.250
7	Sapu Nylon	1	67.273	0	67.273	0	67.273	67.273
8	Handsantizer Liter	2	77.000	0	154.000	0	154.000	154.000
9	Handsantizer Gelon 5 Liter	1	385.000	0	385.000	0	385.000	385.000
TOTAL				6.313.853	1.223.605	6.313.853	1.223.605	1.223.605

Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah

ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Persediaan				
				Saldo Awal Neraca Audited (Rp.) 31 Desember 2020)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.) (31 Desember 2021)	Saldo Stock Opname Barang (31 Desember 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lampu Philips LED 30 W	8	147.273	1.178.184	0	1.178.184	0	0
2	Lampu Philips LED 19 W	24	103.636	2.487.264	0	2.487.264	0	0
3	Isolatif Listrik	7	16.364	114.548	0	114.548	0	0
4	Kawachi Senter 5510	1	272.727	272.727	0	272.727	0	0
5	Kawachi Senter 5210	2	381.818	763.636	0	763.636	0	0
6	Terminal Panjang Tanpa Kabel & Lubang Kontak	3	218.18	654.54	0	65.454	0	0
7	Kabel Rol 15 Meter	4	103.636	414.544	0	414.544	0	0

8	Kawachi Lampu Charge	6	185.454	1.112.724	0	1112724	0	0
9	Kabel NYM	1	381818	381.818	0	381.818	0	0
10	Tespen	1	13.090	13.090	0	13.090	0	0
11	Kontak Dinding	15	10.909	163.635	0	163.635	0	0
12	Staker	14	7.636	106.904	0	106.904	0	0
13	Terminal 5 Lobang Kontak	2	27.272	54.544	0	54.544	0	0
14	Lampu Selang	2	327272	654.544	0	654.544	0	0
15	Lampu Pohon Terang	2	163.636	327272	0	327272	0	0
TOTAL				8.110.888	0	8.110.888	0	0

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG,**


MEISKE M. TEROK, SE
PENATA TINGKAT I
NTP. 19650328 198602 2 001

PENGURUS BARANG,


RENSY R. MANARISIP, ST
PENATA
NTP. 19811203 201001 1 005

**MENGETAHUI
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG**


EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi	:	PROVINSI SULAWESI UTARA
Kab./Kota	:	-
Bidang	:	Bidang Perhubungan
Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Sub Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
UPB	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	18.482.647.401,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	18.128.182.295,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	3.814.199.512,00
1.3.2.0201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3.814.199.512,00
1.3.2.0201.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERDORONGAN	3.252.994.512,00
1.3.2.0201.01.02	Jeep	734.500.000,00
1.3.2.0201.01.03	Station Wagon	2.518.494.512,00
1.3.2.0201.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	342.005.000,00
1.3.2.0201.04.01	Sepeda Motor	342.005.000,00
1.3.2.0201.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	219.200.000,00
1.3.2.0201.06.02	Mobil Jenazah	219.200.000,00
1.3.2.03	ALAT Bengkel dan Alat ukur	12.800.000,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	12.800.000,00
1.3.203.03.07	UNIVERSAL TESTER	12.800.000,00
1.3.203.03.07.10	Scanner (Universal Tester)	12.800.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.397.593.834,00
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	1.026.486.607,00
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	5.900.000,00
1.3.2.05.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Incl)	5900.000,00
1.3.2.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	99.000.000,00
1.3.2.05.0103.07	Mesin Fotocopy Folio	99.000.000,00
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	478.487.607,00
13.2.05.0104.01	LemariBesi/Metal	227.702.000,00
13.2.05.0104.02	LemariKayu	53.410.000,00
13.2.05.0104.03	Rak Besi	118.032.907,00
13.2.05.0104.04	Rak Kayu	17.575.200,00
13.2.05.0104.05	Filing Cabinet Besi	34.582.500,00
13.2.05.0104.07	Brandkas	27.185.000,00
13.2.05.0105	ALAT KANTOR LAINNYA	443.099.000,00
13.2.05.01.0502	CCTV - Camera Control Television System	48510.000,00
13.2.05.01.05.05	White Board	158.00.000,00
13.2.05.01.05.10	Alat Penghancur Kertas	12500.000,00
13.2.05.0105.12	Mesin Absensi	108.014.000,00
13.2.05.0105.34	Display	30.800.000,00
1.3.2.05.01.0553	Focusing Screen/Layar LCD Projector	33.150.000,00
1.3.2.05.01.0576	Papan Nama Instansi	6.000.000,00
1.3.2.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya	188.325.000,00
1.3.20502	ALAT RUMAH TANGGA	2.805.446.727,00
1.3.2.05.02.01	MEJEBE LAIR	773.872.150,00
1.3.2.05.02.0101	Meja Kerja Besi/Metal	97.350.000,00
1.3.2.05.02.01.02	Meja Kerja Kayu	14.260.000,00
1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi Metal	900.000,00
1.3.20502.01.04	Kursi Kayu	9.800.000,00
1.3.2.0502.01.08	Meja Rapat	101.880.000,00
1.320502.01.14	Meja Resepsionis	9.955.000,00
1.3.2.05.02.01.17	Meja Panjang	7.370.000,00
1.3.2.0502.01.24	Meja 1/2 Biro	65.515.000,00
1.3.2.0502.01.27	Meja Makan Besi	7.850.000,00
1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	190.097.600,00
1.3.2.05.02.01.31	Kursi Tamu	3.248.300,00
1.3.2.05.02.0132	Kursi Putar	20.625.000,00
1.3.2.05.02.0136	Kursi Lipat	6.500.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi	:	PROVINSI SULAWESI UTARA
Kab./Kota	:	-
Bidang	:	Bidang Perhubungan
Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Sub Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
U P B	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.205.02.01.48	Sofa	238.521.250,00
1.3.205.02.03	ALAT PEMBERSIH	3.650.000,00
1.3.2.0502.03.03	Mesin Pemotong Rumput	3.650.000,00
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	481.033.747,00
1.3.2.05.02.04.01	Lemari Es	49.644.000,00
13.2.05.02.04.03	A.C. Window	147.215.000,00
1.3.2.05.02.04.04	A.C. Split	284.174.247,00
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	700.000,00
1.3.2.05.02.05.08	Kitchen Set	700.000,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1.546.190.830,00
13.2.05.02.06.02	Televisi	302.590.000,00
13.2.05.02.06.05	Amplifier	19.800.000,00
13.2.05.02.06.07	Loudspeaker	24.090.000,00
13.2.05.02.06.08	Sound System	59.862.000,00
13.2.05.02.06.12	Wireless	39.485.534,00
1.3.2.05.02.06.14	Microphone	107.316.000,00
1.3.2.0502.06.16	Microphone Table Stand	93.940.000,00
1.3.2.0502.06.17	Mc Conference	14.520.000,00
1.3.2.0502.06.18	Unit Power Supply	165.137.750,00
1.3.2.0502.06.21	Camera Video	292.441.600,00
1.3.2.0502.06.27	Alat Hiasan	44.247.500,00
1.3.2.0502.06.29	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1.000.000,00
1.3.2.05.02.06.36	Tangga Aluminiun	5.454.546,00
1.3.2.05.02.06.38	Dispenser	31.754.000,00
1.3.2.05.02.06.39	Mimbar /Podium	5.000.000,00
1.3.2.05.02.06.48	Handy Cam	39.450.000,00
1.3.2.05.02.06.57	Karpet	10.065.000,00
13.2.05.02.06.59	Gordyn/Kray	259.038.300,00
1.3.2.05.02.06.77	Alat Rumah Tangga Lain-lain	30.998.610,00
13.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	565.660.500,00
13.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	297.695.500,00
1.3.2.05.03.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	97.997.500,00
1.3.2.05.03.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	55.025.000,00
1.3.2.05.03.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12.900.000,00
1.3.2.05.03.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	131.773.000,00
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	15.400.000,00
1.3.2.05.03.02.14	Meja Rapat Pejabat lainnya	15.400.000,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	171.830.000,00
1.3.2.05.03.03.04	KursiKerja Pejabat Eselon II	77.830.000,00
1.3.205.03.03.05	KursiKerja Pejabat Eselon III	23.375.000,00
1.3.2.05.03.03.06	KursiKerja Pejabat Eselon IV	17.225.000,00
1.3.2.05.03.03.08	KursiKerja Pegawai Non Struktural	53.400.000,00
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	16.775.000,00
1.3.2.05.03.04.05	KursiRapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	16.775.000,00
1.3.2.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	12.540.000,00
1.3.2.05.03.05.04	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	12.540.000,00
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	51.420.000,00
1.3.2.05.03.07.05	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	4.470.000,00
1.3.2.05.03.07.09	Buffet Kaca	9.950.000,00
13.2.05.03.07.10	Lemari Arsip Pejabat lainnya	37.000.000,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.571.159.677,00
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	2.544.538.427,00
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	153.662.778,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi	:	PROVINSI SULAWESI UTARA
Kab./Kota	:	-
Bidang	:	Bidang Perhubungan
Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Sub Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
UP 8	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.06.01.0105	Audio Amplifier	44110.000,00
1.3.2.06.010148	Uninterruptible Power Supply (UPS)	109.552.778,00
13.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2.235.985.649,00
1.3.2.0601.02.03	Camera Electronic	50.000.000,00
1.3.2.0601.02.12	Video Monitor	1.140.993.005,00
132.0601.0224	Video Processor	713.973.333,00
13.2.06.01.02.45	Tripod Camera	8.700.000,00
1.3.2.06.01.02.57	Slide Projector	2.800.000,00
1.3.2.06.01.02.60	Camera Rm	7.117.000,00
1.3.2.0601.02.61	Lensakamera	66.121.000,00
1.3.2.0601.02.105	Layar Film/Projector	241.362.711,00
1.3.2.06.01.02.116	Head Set	4918.600,00
1.3.2.0601.06	ALAT STUDIO LAINNYA	154.890.000,00
1.3.2.06.01.06.01	Alat Studio Lainnya	154.890.000,00
1.3.2.0602	ALAT KOMUNIKASI	26.621.250,00
1.3.2.0602.01	ALAT KOMUNIKASI TELE PHONE	8.331.000,00
1.32.06.02.01.03	Pesawat Telephone	3.000.000,00
1.3.2.06.02.01.06	Handy Talky (HT)	5.331.000,00
1.32.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	1.744.000,00
1.32.06.02.05.04	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	1.744.000,00
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	14.816.250,00
1.32.06.02.06.02	Wireless Amplifier	5.907.000,00
13.2.06.02.06.07	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	8.909.250,00
13.2.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	1.730.000,00
13.2.06.0207.20	alat-alat sandi lainnya (dst)	1.730.000,00
13.2.10	KOMPUTER	7302.629.272,00
13.2.10.01	KOMPUTER UNIT	2.905.558.201,00
13.2.10.0101	KOMPUTER JARINGAN	446.317.800,00
13.2.10.0101.01	Mainframe (Komputer Jaringan)	446.317.800,00
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	2.459.2.40401,00
1.3.2.10.01.02.01	PC Unit	851.706.550,00
1.3.2.10.01.0202	Lap Top	603.117.095,00
1.3.2.10.01.0203	Note Book	674.289.819,00
1.3.2.1001.02.10	Personal Komputer lainnya	330.126.937,00
13.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4.397.071.071,00
1.3.2.11002.01	PERALATAN MAINFRAME	398.984.720,00
1.3.2.11002.01.12	Hard Disk	9.500.000,00
1.3.2.11002.01.18	peralatan mainframe lainnya(dst)	389.181.720,00
1.3.2.11002.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	360.466.500,00
1.3.2.11002.03.02	Monitor	98.623.000,00
1.3.2.11002.03.03	Printer (Peralatan Personal Komputer)	207.212.500,00
1.3.2.11002.03.04	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	34.605.000,00
13.2.1102.03.07	External	110.30.000,00
13.2.1102.03.17	External/ Portable Hardisk	4.500.000,00
13.2.1102.03.18	Peralatan Personal Komputer lainnya	4.495.000,00
13.2.1102.04	PERALATAN JARINGAN	3.551.207.180,00
1.3.2.1102.0401	Server	3.189.492.972,00
1.3.2.1102.0402	Router	4.0257.107,00
1.3.2.1102.0423	Wireless Access Point	63.911.800,00
1.3.2.1102.0424	Switch	18.562.000,00
1.32.1102.04.33	Peralatan Jaringan lainnya	238.983.301,00
1.3.2.1102.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	86.412671,00
1.3.2.1102.05.01	Peralatan Komputer lainnya	86.412671,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi	:	PROVINSI SULAWESI UTARA
Kab./Kota	:	-
Bidang	:	Bidang Perhubungan
Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
Sub Unit Organisasi	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
UPB	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	29.800.000,00
1.32.1901	PERALATAN OLAH RAGA	29.800.000,00
1.3.2.1901.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	29.800.000,00
1.32.1901.06.05	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	29.800.000,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	352.682.106,00
1.33.01	BANGUNAN GEDUNG	119.682.900,00
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	119.682.900,00
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	119.682.900,00
1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	119.682.900,00
1.3.3.02	MONUMEN	232.999.206,00
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	232.999.206,00
1.3.3.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	232.999.206,00
1.3.3.02.01.03.04	Makan Bersejarah	232.999.206,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	1783.000,00
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.783.000,00
13.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.783.000,00
13.5.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	1.783.000,00
13.5.01.01.07.05	Management dan Perkantoran	1.783.000,00
1.5	ASET LAINNYA	2.636.091.720,00
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	2.033.447.220,00
15.3.01	ASET TIDAK BERWIJUD	2.033.447.220,00
15.3.01.01	ASET TIDAK BERWIJUD	2.033.447.220,00
15.3.01.01.05	SOFTWARE	2.033.447.220,00
15.3.01.01.05.01	Software	2.033.447.220,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	602.644.500,00
15.4.01	ASET LAIN-LAIN	602.644.500,00
15.4.01.01	ASET LAIN-LAIN	602.644.500,00
15.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	602.644.500,00
15.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	563.844.500,00
15.4.01.01.01.03	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	38.800.000,00

Manado, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
NIP. 19710803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-Desember-2021

Bidang Perhubungan : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
 Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
 Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

KODE ASET	NO RES	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT Thn Bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2021	NILAI BUKU
							Seimester I	Seimester II		
Aset Tetap										
2		PERALAYAN DAN MESIN	18,482,647,401	10,216,282,586	1,399,286,265	1,410,111,329	1,3,26,283,180		5,101,799,115	
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN	18,128,182,295		2,552,956,411	192,467,281	2,937,642,991		8,635,521	
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOGOR	3,814,199,512							
1.3.2.3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	12,800,000		6,400,000	1,280,000	8,360,000		3,840,000	
1.3.2.3.3		ALAT UKUR								
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1,025,486,607		573,430,585	59,954,551	692,407,553		334,079,054	
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR	1,025,486,607		1,702,216,084	161,656,028	2,028,867,421		776,579,306	
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA	2,805,446,727		434,684,031	19,337,798	21,608,500		89,440,171	
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	565,660,500							
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2,544,538,427		99,785,30	231,197,229	235,364,015	1,464,346,644	1,080,191,783	
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO	26,621,250		22,513,083	272,956	472,900	23,458,949	3,262,301	
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI								
1.3.2.10		KOMPUTER	2,905,558,201		1,571,383,358	246,411,34	245,754,630	2,065,279,122	842,279,079	
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT	4,397,571,071		2,324,602,812	487,109,169	489,578,190	3,301,390,171	1,095,780,940	
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER								
1.3.2.19		PERALATAN OLAH RAGA	29,800,000		29,800,000	0	0	29,800,000	0	0
1.3.2.19.1		PERALATAN OLAH RAGA								
3		GERUNG DAN BANGUNAN	352,682,106		33,724,616	3,574,834	40,873,684		311,808,422	
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG	119,682,900		10,364,000	1,192,570	1,192,570	12,749,140	106,933,700	
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA								
1.3.3.2		MONUMEN	232,989,206		23,360,016	2,382,264	2,382,264	28,124,54	204,874,662	
1.3.3.2.1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI								
5		ASET TETAP LAINNYA	1,783,000		0	0	0	0	1,783,000	
1.3.5.1		BAHAN PERPUSTAKAAN								
1.3.5.1.1		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCIPTAK	1,753,000		0	0	0	0	1,753,000	
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP - GABUNGAN										
Halaman 1 dari 2										



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-Desember-2021

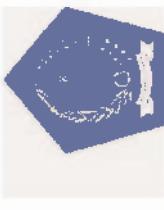
Bidang : Bidang Perhubungan
 Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
 Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	PENYUSUTAN Semester I	PENYUSUTAN Semester II	NILAI BUKU
					Thn	Bulan				
		Jumlah Aset Tetap	18.482.647.401		10.750.007.602		1.403.563.099	1.413.686.163	1.413.686.164	5.415.390.537
		Jumlah	18.482.647.401		10.750.007.602		1.403.563.099	1.413.686.163	1.413.686.164	5.415.390.537

Manado, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA**

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
 NIP. 19710803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

DAFTAR PIUTANG PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	AGING	TAHUN	NILAI PIUTANG PAJAK	KEBIJAKAN	NILAI PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
1	2	3	4	5	6
1	C - 1 TAHUN	-	-	0.5%	-
2	1 - 2 TAHUN	-	-	10%	-
3	3 - 5 TAHUN	-	-	50%	-
4	> 5 TAHUN	-	-	100%	-

Manado, Januari 2022
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGARAN *E.S.L*

E.S.L
EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	AGING	TAHUN	NILAI PIUTANG RETRIBUSI	KEBIJAKAN	NILAI PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
1	2	3	4	5	6
1	C - 1 BULAN	-	-	0.5%	-
2	1 - 3 BULAN	-	-	10%	-
3	3 - 12 BULAN	-	-	50%	-
4	> 12 BULAN	-	-	100%	-

Manado, Januari 2022
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



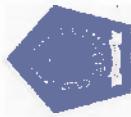
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

DAFTAR PIUTANG SELAIN PAJAK DAN RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	AGING	BULAN	NILAI PIUTANG LAIN-LAIN	KEBIJAKAN	NILAI PENYSIHIAN PIUTANG LAIN-LAIN
1	2	3	4	5	6
1	< Tgl Jatuh Tempo	-	-	0,5%	-
	> 1 bln sejak tgl surat tagihan pertama	-	-	10%	-
2	> 1 bln sejak tgl surat tagihan kedua	-	-	50%	-
3	> 1 bln sejak tgl surat tagihan ketiga	-	-	100%	-
4					

Manado, Januari 2022
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**

**DAFTAR HUTANG PENGADAAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2021**

Manado Januari 2022

PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

~~EVAN STEVEN LEEW, S.S.505~~
~~COMBINA UTAIMA MADYA~~
NIP.197208031998031005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

DAFTAR HUTANG BEBAN INTERNET
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA REKENING BELANJA	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH HUTANG (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	550.000
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	PT. MANADO SULUT DIGITAL	44.000.000
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	3.568.400
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	1.551.000
5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan	PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	70.029.221
			JUMLAH	119.698.621

Manado, Januari 2022
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

**DAFTAR BEBAN DI BAYAR DIMUKA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	NAMA REKENING BELANJA	PERIODE PEMBAYARAN	BEBAN DIBAYAR DIMUKA (Rp.)			
				2	3	4	5
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-

Manado, Januari 2022
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN


EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	NAMA REKENING BELANJA	TOTAL PEMBAYARAN (Rp.)	PERIODE PEMBAYARAN
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

Manado, Januari 2022
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**

JALAN 17 AGUSTUS NO. 69 TELP. 0431-865559, FAX. 0431-865471

<http://www.sulutprov.go.id> e-mail : dkips@ sulutprov.go.id

MANADO 95119

**DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGELUARAN (KDP)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

NO	NAMA PAKET KEGIATAN	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI		NILAI KDP			SALDO AKHIR (Rp.) (31 Des 2021)
			FISIK s.d 31 Des 2021	KEUANGAN s.d Des 2021	SALDO AWAL NERACA (Rp) 31 Des 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Manado, Januari 2022
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.197720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**

Jl. 17 Agustus No. 69 Telp. (0431) 865559 Fax (0431) 865471 Manado 95119
Website : <http://sulutprov.go.id> E-mail : dkips@sulutprov.go.id

**DAFTAR INVESTASI NON PERMANEN
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BARANG	HARGA SATUAN	NILAI INVESTASI NON PERMANEN			
					SALDO AWAL NERACA AUDITED (Rp.) 31 Des 2020	PENAMBahan	PENGURANGAN	SALDO AKHIR (Rp.) (31 DES 2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Manado, Januari 2022
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN *f*

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp.)
1	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)	Jl. Dipenogoro No. 111, Mahakert Timur Manado	2.260.118.412
	Total		2.260.118.412

Manado, Januari 2022
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH

**DAFTAR PENERIMA BANSOS SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

Manado, Januari 2022
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN


EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH**

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PARTAI POLITIK
TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Manado, Januari 2022


EVANS STEVEN LIOW, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19720803 199803 1 005

